

TEORI POLITIK IBN TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Suharti*

Abstraksi Islam memberikan landasan yang ramah bagi hadirnya ragam pergulatan pemikiran. Politik adalah salahsatunya. Salah satu tokoh Islam yang praksis politiknya banyak ditilik jejaknya adalah Ibn Taimiyah. Tapak-kaki khazanah yang ia jejak acapkali menjadi rujukan standar para teoretikus yang muncul belakangan, khususnya sajian-kajiannya tentang politik. Tulisan berikut ini akan mengkaji pemikiran politik Ibn Taimiyah, selanjutnya mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibn Taimiyah tentang politik, pemerintahan, kepemimpinan dan hakikat negara, serta relevansi gagasan politik Ibn Taimiyah dalam konsep negara modern.

Kata Kunci: Politik, Islam, Ibn Taimiyah, Pemerintahan, Kepemimpinan, Negara.

Pendahuluan

Berbicara tentang politik Islam (*siyasah syar'iyah*) tidak pernah sampai pada titik final. Bahkan hingga saat ini masih menjadi diskusi panjang mengenai intervensi agama masuk ke ranah publik termasuk politik. Ada yang mengatakan bahwa agama dan politik adalah dua hal yang terpisah karena agama adalah masalah batin yang tidak berubah dengan kondisi dan waktu, sedangkan politik adalah berkaitan dengan kekuasaan peradaban yang senantiasa berdialektika. Politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dipisahkan dalam hal ini, jika tidak agama akan kehilangan substansi dan ruhnyanya.¹ Hal serupa juga dikatakan bahwa Sesungguhnya syari'at Islam adalah syari'at ruhiyah saja, tidak ada kaitannya dengan masalah pemerintahan.² Model pemikiran seperti ini tentu tidak lepas dari *worldview*

* Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima, E_mail: suhartinukman@yahoo.com

¹ Ibn Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 13.

² Muhammad Abed al-Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 112

pemikiran Barat (Eropa) yang kebangkitannya di antaranya ditandai dengan desakralisasi politik (*desacralization of politics*) yang merupakan satu komponen dari sekularisasi.³

Sejarah Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah, *khulafaurrasyidin*, periode klasik, periode pertengahan hingga masa modern. Jika khazanah itu dikonsepkan sangat mungkin melahirkan keanekaragaman teori pemikiran politik. Namun yang menarik perhatian setidaknya di masa periode awal Islam khazanah itu lebih dominan melahirkan teori-teori *firqah* dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun sesungguhnya akar persoalannya berawal dari pertikaian politik.

Memasuki periode klasik yang ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia Islam, di masa ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbas (750-1258 M). Secara politis, masa itu Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode Bani Umayyah, kajian *fiqh* politik (*siyasah*) masih belum juga muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakan pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah barulah kajian *fiqh* *Siyasah* ini mulai dikembangkan.⁴ Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama Sunni waktu itu cenderung akomodatif dan mendukung kekuasaan.⁵ Sementara

³ Secara awam *worldview* atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup. Setiap kepercayaan, bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang memiliki *worldview* masing-masing. Maka dari itu jika *worldview* diasosiasikan kepada suatu kebudayaan maka spektrum maknanya dan juga termannya akan mengikuti kebudayaan tersebut. Lihat: Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", *ISLAMIA*, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, THN II No.5 April-Juni 2005, hlm. 10-20

⁴ Penulis dapat menyatakan seperti ini karena di masa Bani Umayyah belum ada karya yang dapat dijadikan referensi pemikiran politik Islam. Memasuki pertengahan abad ke-9 barulah lahir karya Ibn Abi Rabi berjudul "*Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*" dan abad 10 M karya monumental ilmuwan legendaris muslim yang hidup di masa Dinasti Abbasiyah, yakni Al-Mawardi dengan karyanya yang berjudul *Al Ahkam al-Sulthania wa al-Wilayat al-Diniyyah*.

⁵ Ibn Abi Rabi' adalah dianggap ulama Sunni pertama yang menulis kitab *siyasah* mempersembahkan karyanya berjudul "*Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*" kepada Khalifah Mu'tashim (833-842 M). Sebagai buku persembahan tentu tidak memberikan koreksi terhadap penguasa. Dalam buku itu Ibn Abi Rabi

itu di sisi yang lain Syi'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah berkembang menjadi kelompok oposisi, walaupun belum memiliki pengaruh kuat.

Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik Sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan⁶ di tengah kepentingan-kepentingan golongan. Karena sifat akomodatif itu Sunni mendominasi peraturan politik saat itu dan para pemikir politiknya mampu mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan.

Memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi objektif. Maka pada periode pertengahan itu lahirlah pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibn Taimiyah.

Mengkaji pemikiran Ibn Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam tulisan ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibn Taimiyah. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibn Taimiyah tentang politik, pemerintahan, kepemimpinan dan hakikat negara, di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya, serta relevansi gagasan politik Ibn Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibn Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

Metateori Politik Islam

Diskursus *as-siyasah as-syar'iyah* merupakan pembahasan yang masih terus berkembang. Karena ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Maka kajian ini lebih

memuji-muji al-Mu'tashim sebagai Khalifah yang adil, bijaksana dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sementara al-Ghazali (1058-1111 M) dalam *Iqtishad fi al-'Itiqad* menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci). Karenanya umat tidak boleh memberontak pada kekuasaan. Al-Ghazali dan al-Mawardi secara tegas menyatakan seperti pemuka Sunni lainnya menetapkan syarat Quraisy untuk menjadi kepala negara. Pandangan mereka dapat dianggap sebagai pembelaan terhadap kekuasaan. Ini wajar, karena ketika itu puncak pimpinan ada di tangan orang Quraisy di samping hadis yang secara teks menyebutkan ketentuan tersebut.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 22.

bersifat kontekstual, bergantung perbedaan tempat dan waktu. Meskipun demikian syari'ah tidak serta merta menjadi relatif karena memiliki kemutlakan yang tidak akan pernah berubah dalam mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.⁷

Maka sebelum masuk pada pokok pembahasan, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi politik Islam. Secara bahasa politik Islam diambil dari kalimat *sa-sa, yasuwsu siyasa*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan⁸ untuk mencapai tujuan yang membawa kemaslahatan. Adapun secara istilah politik menurut Ibn Taimiyah adalah berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyat.⁹ Ibn Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menyatakan, "Politik adalah segala perbuatan yang membawa manusia kepada lebih dekat kepada kemaslahatan dari kemafsadatan, sekalipun rasul tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya".¹⁰

Sementara dalam *Ensiklopedi al-Ulum as-Siyasah* dikatakan bahwa politik Islam adalah segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan penyelesaian berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat.¹¹ Jadi politik Islam adalah keharusan menjalankan amanah bagi pemegang kekuasaan/pemerintah, dalam mengatur/ mengeluarkan kebijakan umum (*public policies*), mengendalikan dan mengambil keputusan (*decision making*) untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Mengenai istilah kekuasaan politik dalam terminologi al-Qur'an diketahui dalam tiga istilah. *Pertama*, "*sulthan*"¹² secara *harfiyyah* berarti "kekuatan dan paksaan" adapun secara istilah adalah kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau memaksa terhadap orang lain. *Kedua*, *mulk* secara *harfiyyah* berarti

⁷ HLM.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm, 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁹ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ashlah ar-Ra'y Wa Ra'iy*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi), hlm, 4.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh ...*, hlm, 27.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 19.

¹² Q.S. An-Nisa', 4: 90, Q.S. Al-Hasyr, 59: 6, Q.S. Al-Isra' 17:33

“keabsahan dan kemampuan” kemudian secara istilah adalah kekuasaan sebagai objek hak (pemilikan).¹³ Ketiga, “*hukm*” yang berarti memberi kekang, dan mencegah seseorang dari yang diinginkannya. Juga Ibn Manzhur memberikan arti ilmu dan pengetahuan dan memutuskan dengan adil.¹⁴ Dikatakan demikian, karena pengetahuan dan keputusan yang adil mempunyai kemampuan mencegah seseorang berbuat kerusakan. Jadi pemerintah selaku pemangku kekuasaan politik memiliki wewenang dan otoritas secara *de jure* dan *de facto* untuk mengatur dan menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Diakui memang Islam sebagai agama universal secara *mantuq* tidak disebutkan “*as-siyasah as-syar'iyah*” tetapi secara *mafhum* dapat diketahui bahwa teks al-Qur'an membicarakan banyak mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik.¹⁵ Artinya agama tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan.

Ibn Aqil berkata bahwa politik adalah perbuatan manusia yang lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun perbuatan tersebut belum dilakukan oleh Rasul dan tidak ada pula wahyu yang menjelaskannya.¹⁶ Lebih tegas lagi komentar Ibn al-Qayyim bahwa politik *syar'i* adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas, sementara mereka menyangka bahwa politik itu tidak mengandung kaidah-kaidah syari'at. Demi Allah SWT. Sesungguhnya politik itu tidak bertentangan dengan risalah yang dibawa Rasulullah Saw.”¹⁷

Jadi politik dan agama/syari'ah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memang politik dan agama adalah sesuatu yang berbeda tetapi tidak berarti harus berpisah atau dipisahkan. demikian halnya jasad dan ruh adalah sesuatu yang berbeda, tetapi

¹³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 92.

¹⁴ Begitu juga Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui keadilan dan kezaliman kecuali dengan ilmu. Lihat, Ibn Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 181.

¹⁵ Hamid Fahmy Zarkasyi, “Identitas dan Problem Politik Islam”, dalam *Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, Jakarta: INSIST, 2009, hlm. 5.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 61.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63.

harus menyatu dalam jasad seseorang maka itu dinamakan manusia. Begitu pula agama dan politik merupakan satu kesatuan yang utuh di mana Politik Islam (*as-siyasah as-syar'iyah*) merupakan bagian dari syari'ah.

Mengenai landasan normatif politik Islam bisa berkaca kepada pelaku Sejarah politik/politikus masa lampau yang tertuang dalam kisah-kisah al-Qur'an. Misalnya, pemberian kerajaan yang besar kepada keluarga Ibrahim,¹⁸ pengangkatan Thalut sebagai raja,¹⁹ pemberian hikmah dan kerajaan kepada Daud,²⁰ anugerah kerajaan kepada Dzulqarnain dan memperoleh jalan untuk mencapai segala sesuatu,²¹ Ratu Balqis sebagai raja yang adil dan egaliter,²² anugerah berupa kepemimpinan orang-orang Mesir yang tertindas.²³ Juga ada contoh perilaku politik yang tercela. Misalnya Ceraan kepada raja yang zalim, Fir'aun seorang pemimpin yang tiran dan memecah belah umat.²⁴ Dengan demikian teks (al-Qur'an dan hadis) dalam memberikan petunjuk dan landasan berpolitik tidak hanya sebatas pada sederetan teori-teori, tetapi juga memberikan gambaran masa lalu sebagai *ibrah* berupa sejarah yang otentisitas dan kevaliditasannya tidak diragukan lagi.

Dengan demikian, politik Islam merupakan salah satu bentuk pengaturan, pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, yang terkait dengan keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, rahmat dan kemaslahatan yang berasaskan rambu-rambu syari'ah.

Menapaktifikasi Biografi Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap *Taqi al-Din Abul Abbas ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah*. Goldziher melukiskannya sebagai "pemilik pribadi paling terkemuka abad ke-7 H", juga digambarkan sebagai seorang teolog Muslim abad ke-13 dan 14 paling kenamaan.²⁵

¹⁸ Q.S. an-Nisa, 4: 54.

¹⁹ Q.S. al-Baqarah, 2: 247.

²⁰ Q.S. al-Baqarah, 2: 251.

²¹ Q.S. al-Kahfi, 84.

²² Q.S. an-Naml, 27: 251.

²³ Q.S. al-Qashas, 28: 4.

²⁴ Q.S. al-Qashas, 4: 4.

²⁵ Goldziher, "Ibn Taimiyah ...", 72.

Ia lahir pada 22 Januari 1262/661 H di Harran, dekat Damaskus, lima tahun setelah jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah telah berakhir, dan tutup usia pada tahun 728 H/1329 M.²⁶ Ini berarti ia hidup pada masa Dinasti Mamalik berkuasa atas Mesir dan Syria, yaitu pada masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin Baybars (658-676H./1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan Nasiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M).²⁷

Dunia Islam pada masa Ibn Taimiyah hidup sedang mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral.²⁸ Pada saat itu hanya Dinasti Mamalik-lah satu-satunya kekuatan di dunia Islam.²⁹ Di bagian Timur dinasti ini semua negeri telah ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang Mongol. Sementara itu, pada masa Ibn Taimiyah orang-orang Mongol ini

²⁶ Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 79 dan 82; Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*. Keduanya menyebutkan kelahiran Ibn Taimiyah tanggal 22 Januari 1262 M. Jika tanggal tersebut dihiijriahkan menjadi 29 Shafar 660 HLM. Sebenarnya tanggal kelahiran ini masih diperselisihkan. Dalam buku *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Ali Syami an-Nasysyar menyebutkan tanggal kelahiran Ibn Taimiyah 10 Rabiul Awal 611 H yang bila disesuaikan dengan kalender Masehi berarti tanggal 20 Juli 1214 M. Sementara Ahmadi Thaha menyebut tanggal kelahirannya 10 Rabiul Awal 661 H bila dihiijriahkan menjadi 12 Januari 1263 M. Jika mengacu pada tahun penyerbuan bangsa Tartar yang menaklukkan kota Bagdad pada tahun 667 Hijriah, saat itu Ibn Taimiyah (masih berusia sekitar 6 tahun) dilarikan oleh ayahnya ke Damaskus. Dari peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang paling mendekati kebenaran tahun kelahirannya adalah 661 HLM.

²⁷ Sultan-sultan Mamalik antara al-Zhahir dan al-Nashir adalah al-Sa'id Nashiruddin Barakah (676-678HLM./1277-1280 M), al-Adil Badruddin Salamis (678-678 HLM./1280-1280 M), al-Manshur Saifuddin Qala'un al-Alfi (678-689 HLM./1280-1290 M.), al-Asyraf Shalah al Din Khalil (689-693 HLM.)/1290-1294 M.) Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang pertama (693-694 HLM./1294-1295 M.), al-Adil Zainuddin Kitbugha (694-696 HLM.)/1295-1297 M.), al-Manshur Hasanuddin Lajin (696-698 HLM./1297-1299 M.), Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang kedua (698-708 HLM./1299-1303 M.), dan al-Muzaffar Ruknuddin Baybars II (708-709 HLM./1309-1309 M.). C. E. Bosworth, *Dinasti...*, 88-89.

²⁸ Sjadzali, *Islam ...*, hlm. 80.

²⁹ Dikatakan demikian karena di saat segenap wilayah Islam dikuasai oleh pasukan Mongol, Dinasti Mamalik bahkan dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran *Ain Jalut*, Syria.

telah memeluk agama Islam, tetapi keIslaman mereka hanya sekedar formalitas karena mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya.³⁰ Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, di mana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum Muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.³¹ Pada masa itu Islam sedang dihadapkan kepada tiga ancaman besar, yaitu pejuang-pejuang Kristen dari Eropa, pasukan Mongol, dan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri.³²

Jatuhnya Bagdad ke tangan Tartar adalah akhir dari Dinasti Abbasiyah, dan merupakan proses klimaks disintegrasi kekuasaan Islam. Hancurnya dinasti ini menyebabkan para sultan, amir, dan raja yang berkuasa di wilayah-wilayah bekas imperium Abbasiyah yang dulunya menjadi satelit Bagdad bebas menggunakan gelar khalifah.³³

Dari para raja, sultan, dan amir yang ada pada waktu itu, hanya penguasa dari dinasti Mamalik di Mesir yang masih merasa perlu untuk mengangkat pangeran Abu al-Qasim Ahmad bin Amir al-Mu'minin, paman Khalifah Mu'tashim yang dibunuh oleh bangsa Tartar di Bagdad yang bergelar al-Mustanshir bi-Allah untuk menjadi khalifah di Kairo pada tahun 659 H.³⁴

Namun kekhalifahan ini hanya bersifat formalitas, karena otoritas yang sesungguhnya berada di tangan sultan-sultan Mamalik. Walaupun demikian, dengan pengangkatan al-Mustanshir bi-Allah tersebut fiksi historis dunia Islam tetap dapat dipertahankan, yaitu bahwa secara politis dan spiritual dunia Islam masih tetap eksis, sebab eksistensi khalifah sangat diperlukan sebagai pengganti Nabi. Untuk selanjutnya khalifah memberikan otoritas yang sesungguhnya kepada sultan Mamalik

³⁰ Timur Lenk atau Timur Si Pincang adalah keturunan bangsa Mongol yang sudah memeluk Islam tetapi serangannya ke beberapa wilayah Islam menimbulkan malapetaka yang tidak kalah hebat dari serangan Hulagu Khan. Lihat dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 117-123.

³¹ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Wahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 34.

³² Lihat penjelasan Philip K. Hitti dalam *History of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin et.al. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 616-623.

³³ Sjadzali, *Islam ...*, hlm. 80.

³⁴ Lihat uraian Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 41-42.

sehingga secara yuridis sultan berhak menuntut kepatuhan dari pangeran-pangeran dan amir-amir di dunia Islam. Itulah sebabnya, meski akhirnya imperium ini bersifat monarkhis, namun secara *de facto* inilah satu-satunya kekuatan Islam yang dapat diandalkan saat itu. Yang menarik kemudian adalah membentuk pandangan Ibn Taimiyah bahwa penguasanya adalah pembela-pembela agama dan ia pun memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.

Pokok Pikiran Politik Ibn Taimiyah

Lahirnya suatu pemikiran sangat erat kaitannya dengan konteks sosial sebagai faktor yang melatarinya. Sebuah pemikiran lahir umumnya setelah mengalami proses dialektika sosial yang panjang, karena itu tidak dapat memisahkan diri dari faktor situasional yang mengitarinya.

Untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektual seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan dapat menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasikan ide, pandangan dan sikapnya, bahkan metode yang ditempuh untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan.³⁵ Demikian juga dengan Ibn Taimiyah, sebagai pemikir yang realistis, di atas realitas politiklah ia merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang berkembang di masanya. Beberapa pemikiran tersebut antara lain:

Kosmopolitanisme

Dalam setiap pemikirannya, Taimiyah selalu menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama berpikir, pun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (Q.S. al-Anbiya: 107).

Dalam pemerintahan syari'at yang dicita-citakan oleh Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan

³⁵ Masyaruddin, *Pemberontakan Tasawuf: Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*, (Surabaya: JP Box dan STAIN Kudus Press, 2007), hlm. 27.

mempromosikan kebaikan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taimiyah yang terkenal adalah "lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin Muslim yang zalim."³⁶

Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Ibn Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan negara dalam proyek kosmopolitanisme. Ibn Taimiyah mengemukakan tugas utama Negara adalah tegaknya syari'at yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian syari'ah dan keadilan universal adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring.

Lahirnya gagasan kosmopolit dapat ditelusuri oleh berbagai faktor. Ibn Taimiyah hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogenitasnya menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat berbagai bangsa: Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia dan sebagainya. Mereka masing-masing berbeda dalam adat istiadat, tradisi, prilaku dan alam pikiran.³⁷

Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial, dan pemupukan moral serta akhlak. Selain itu dipertajam lagi oleh faktor banyaknya mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Jika semasa hidupnya sering keluar masuk penjara, hal itu tidak selalu disebabkan karena ia memusuhi penguasa. Dia adalah tokoh Mazhab Hanbali yang tegas dan berani, karena kritiknya yang tegas dan tajam terhadap kebiasaan memuja para nabi dan wali, maka ia mendapat tantangan dari para ulama dan mazhab lain.

³⁶ Surwandono, "Pemikiran Politik Islam", Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

³⁷ HLM. A. R. Gibb, *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1960), hlm.

Inklusivisme Politik

Isu sentral yang dikumandangkan Ibn Taimiyyah adalah kembali kepada al-Qur'an dan hadis dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang dan lain-lain. Dalam kerangka inilah kita dapat melihat relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibn Taimiyyah untuk tidak mengakui *kehujjahan* hadis bahwa pemimpin harus dari bangsa Quraisy, karena dalam hadis tersebut ada unsur yang menyeru kepada pengkultusan suatu bangsa atau golongan. Padahal al-Qur'an menurut Ibn Taimiyah memuliakan manusia bukan karena keturunan dan kebangsaan, namun atas dasar ketaqwaan. Sehingga wajar kalau pada akhirnya ia tidak mengakui kequraيسان sebagai salah satu syarat kekhalifahan, tetapi berusaha menggali syarat-syarat kepemimpinan berdasarkan syari'at melalui pesan dan nilai-nilai al-Qur'an.

Kepemimpinan berdasarkan syari'ah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya.

Otoritas Negara

Ibn Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Ibn Taimiyah terkenal dengan gagasan *organis* dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

“Manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.”³⁸

Hakikat pemerintahan menurut Ibn Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena

³⁸ Ibn Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 35.

keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat; “Berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”.³⁹

Hanya saja, Ibn Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Ibn Taimiyah adalah *Lembaga Hisbah* yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*). Ibn Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.⁴⁰

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, Ibn Taimiyah berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh negara. Karena bagaimana pun juga, ujarnya, “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan.”⁴¹

Selanjutnya, Ibn Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan. Menurutinya pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syari'at (*siyasah syari'iyah*). Syari'at dalam pemerintahan ditopang oleh dua pilar yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam,

³⁹ Lihat Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 31.

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, (London, 1985).

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Tugas ...*, hlm. 40.

yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Kriteria Pemimpin

Dalam Islam apa yang kita sebut sebagai jabatan dan aktivitas politik termasuk dalam kategori “amanat” dan “tugas publik (*waliyat*)” seperti yang dipahami dalam syari’at. Karena itu, seorang penguasa politik wajib “menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu” dan untuk “menghukumi secara adil”.⁴² Tujuan semua tugas publik (*waliyat*) adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia.

Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa posisi kepemimpinan politik (*sultan, malik, amir*) dan syari’at saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan syari’at. Ibn Taimiyah bersikukuh bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat dicapai “kecuali kekuasaan dan otoritas pemimpin (*imam*).” Pendapatnya yang terkenal adalah “agama tanpa kekuasaan, jihad, dan harta, sama buruknya dengan kekuasaan, harta, dan perang tanpa agama.”⁴³

Dalam pandangan Ibn Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir untuk mewujudkan keadilan dan kebermanfaatn bersama.

Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Islam.

Doktrin pemimpin dalam Islam adalah tidak lain merupakan wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Di sini, citra raja absolut Timur Tengah dan Iran kuno benar-benar diIslamkan. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal

⁴² Q. S. 4 (An-Nisa): 61-62.

⁴³ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2001)

dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.

Ibn Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menganggap bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cendikia yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah. Tapi di lain sisi Ibn Taimiyah menemukan dilema ketika dihadapkan tentang ada dan tidak adanya pemimpin dalam sebuah negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum Muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini dikatakan berasal dari Rasulullah Muhammad yang bersabda bahwa 70 tahun kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih lebih baik dari hidup sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarkhi.⁴⁴

Dari sumber lain pernyataan "Lebih baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan."⁴⁵ adalah berasal dari pendapat Ibn Taimiyah sendiri dalam buku *As-Siyasah Asy-Syari'ah*

Bentuk Negara Menurut Taimiyah

Cukup menarik, sekalipun Ibn Taimiyah selalu menekankan kekuasaan politik, negara, dan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi Taimiyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari sumber agama (Al-Qur'an dan As-

⁴⁴ Ibn Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terjemahan Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), hlm. 229-241.

⁴⁵ Lihat Masrohin dalam "Pengantar Penerjemah" untuk buku Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm. vii.

Sunnah). Suatu pemikiran ekstrem yang menentang arus pemikiran teori kekhalifahan yang sangat sakral pada masa itu.

Ibn Taimiyah juga mengkritik Sunni dan Syi'ah. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang teori kekhalifahan tradisional ala Sunni dan tidak ada teori imamah Syiah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi: hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya. Meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama (*a religious necessity*). Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan pada syari'at sebagai penguasa tertinggi dan tidak memandang apakah negara itu berbentuk khalifahan, monarki, ataupun republik. Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan sebagai esensi kekuasaan, ketimbang meributkan bentuk negara.

Teori politik Ibn Taimiyah memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern. Dalam asal-usul negara, ia bermaksud menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia yang bebas dari penjelasan agama. Sikap tersebut tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa asal-usul kekuasaan hanya berasal dari sumber agama. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Ibn Taimiyah "melampaui" tradisi berpikir para filsuf Islam tentang teori kekuasaan.⁴⁶

Catatan Akhir

Politik dan agama/syari'ah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memang politik dan agama adalah sesuatu yang berbeda tetapi tidak berarti harus berpisah atau dipisahkan. demikian halnya jasad dan ruh adalah sesuatu yang berbeda, tetapi harus menyatu dalam jasad seseorang maka itu dinamakan manusia. Begitu pula agama dan politik merupakan satu kesatuan yang utuh di mana Politik Islam (*as-siyasah as-syar'iyyah*) merupakan bagian dari syari'ah. Ibn Taimiyah, sebagai pemikir yang realistis, merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan yang berkembang di masanya. Beberapa pemikiran tersebut antara lain: Kosmopolitanisme, doktrin kekhalifahan di

⁴⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

tangan orang Quraisy tidak relevan dan tidak urgen, serta pemikiran Ibn Taimiyah tentang institusi negara. Suatu pemerintah menurut Ibn Taimiyah harus memiliki kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama.

Daftar Pustaka

- Black, Antony. 2001. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Kencana.
- Gibb, H. A. R. 1960. *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill.
- Hitti, Philip K. 2006. *History of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin et.al. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hourani, Albert. 2004. *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*. Bandung: Mizan.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jabiri, Muhammad Abed al-. 2001. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Khan, Qamaruddin. 1983. *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*. Terj. Anas Wahyuddin,. Bandung: Pustaka.
- Madjid, Nurcholish. 1994. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Masyaruddin. 2007. *Pemberontakan Tasawuf: Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*. Surabaya: JP Box dan STAIN Kudus Press.
- Mudzhar, H. M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad-Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2008. *Meluruskan dikotomi Agama dan Politik*. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- _____. Yusuf. 2008. *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Salim, Abdul Muin. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surwandono. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Taimiyah, Ibn. 1960. *Pedoman Islam Bernegara*, terj. Firdaus AN. Jakarta: Bulan Bintang.
- Taimiyah, Ibn. 2004. *Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2005. "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", dalam *ISLAMIA, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, THN II No.5 April-Juni.
- _____. 2009. *Identitas dan Problem Politik Islam*, "Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam"Vo. 2, No. 2. Jakarta: INSIST.